



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
RSUD dr. ACHMAD DARWIS
TA HUN 2021**

Sarilamak, September 2021



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD adalah untuk:

- a. tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program dan kegiatan tahun 2021;
 - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
 - c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2021.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD.
- (3) Perangkat Daerah menyusun Perubahan RKA tahun 2021 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja PD Tahun 2021.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

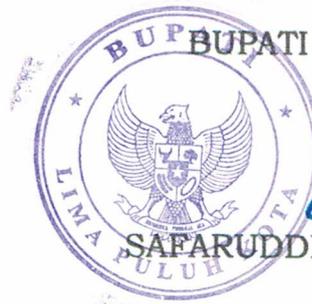
Pembiayaan pelaksanaan Perubahan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021



BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ANDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 36

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Perubahan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2021 ini selesai disusun sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk penyusunan RKPD Perubahan untuk peningkatan kinerja rumah sakit di tahun 2021.

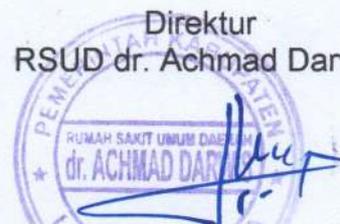
Perubahan Renja Tahun 2021 RSUD dr. Achmad Darwis ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan indikator kinerja yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada RSUD dr. Achmad Darwis untuk Tahun Anggaran 2021 ini.

Dengan adanya Perubahan Renja Tahun 2021 RSUD dr. Achmad Darwis ini, diharapkan seluruh satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, maupun Sumber Pendanaan lainnya.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Perubahan Renja Tahun 2021 RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja RSUD dr. Achmad Darwis di tahun yang akan datang. Namun demikian kami berharap semoga Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis ini dapat berguna bagi kita semua.

Suliki, 23 September 2021

Direktur
RSUD dr. Achmad Darwis



dr. Henky Pramudya, Sp.B
NIP. 19741209 200501 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA
PULUH KOTA NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Triwulan II Tahun 2021.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis.....	II-12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Achmad Darwis.....	II-62
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-65
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021.....	III-1
BAB IV. PENUTUP.....	IV-1

DAFTAR TABEL

TABEL 1 :	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis (E.81) Kabupaten Lima Puluh Kota Triwulan II Tahun 2021.....	II-3
TABEL 2 :	Kinerja Pelayanan Rawat Jalan RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020.....	II-12
TABEL 3 :	Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020.....	II-14
TABEL 4 :	Indikator Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020.....	II-15
TABEL 5 :	Data Hari Rawatan di Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020.....	II-17
TABEL 6 :	Data Kunjungan Gawat Darurat dan Kamar Operasi th 2016-2020.....	II-18
TABEL 7 :	Kinerja Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr. Achmad Darwis Th 2016-2020.....	II-19
TABEL 8 :	Evaluasi Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020.....	II-19
TABEL 9 :	Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit.....	II-20
TABEL 10 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Sesuai Standar Tahun 2020.....	II-33
TABEL 11 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Jenis Obat Yang Terpenuhi dan Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2020.....	II-34
TABEL 12 :	Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.....	II-34
TABEL 13 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Standar Tahun 2020.....	II-38
TABEL 14 :	Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit.....	II-39

TABEL 15 :	Nilai persepsi, Nilai Interval (NI), Nilai Interval Konversi (NIK), mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan.....	II-42
TABEL 16 :	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-43
TABEL 17 :	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-44
TABEL 18 :	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	II-45
TABEL 19 :	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Per Unsur di RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020.....	II-46
TABEL 20 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020.....	II-50 II-52
TABEL 21 :	Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja RS....	
TABEL 22 :	Program dan Kegiatan yang Mendukung Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-56
TABEL 23 :	Kinerja Keuangan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2018-2020.....	II-57
TABEL 24 :	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota	II-61
TABEL 25 :	Perubahan Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021.....	III-2

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 :	Grafik Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit.....	II-21
GAMBAR 2 :	Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-23
GAMBAR 3 :	Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-23
GAMBAR 4 :	Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-24
GAMBAR 5 :	Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-27
GAMBAR 6 :	Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2020.....	II-27
GAMBAR 7 :	Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2020.....	II-27
GAMBAR 8 :	Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2020.....	II-28
GAMBAR 9 :	Dokumentasi Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN).....	II-29
GAMBAR 10 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Emergency Stretcher Tahun 2020.....	II-31
GAMBAR 11 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Monitor For Laparoscopy Th 2020.....	II-31
GAMBAR 12 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Laparoscopy Tahun 2020.....	II-31
GAMBAR 13 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Ventilator Transport Tahun 2020.....	II-32
GAMBAR 14 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Syringe Pump & Infuse Pump Tahun 2020.....	II-32
GAMBAR 15 :	Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.....	II-35
GAMBAR 16 :	Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Mata.....	II-38
GAMBAR 17 :	Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Penyakit Dalam....	II-38
GAMBAR 18 :	Dokumentasi Pelayanan Rongent Di Instalasi Radiologi.....	II-39

GAMBAR 19 :	Dokumentasi Pelayanan Makan Pasien Di Instalasi Gizi.....	II-39
GAMBAR 20 :	Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit.....	II-40
GAMBAR 21 :	Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-43
GAMBAR 22 :	Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-44
GAMBAR 23 :	Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	II-45
GAMBAR 24 :	Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Gawat Darurat Tahun 2020.....	II-51
GAMBAR 25 :	Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Farmasi Tahun 2020.....	II-51
GAMBAR 26 :	Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Rawat Inap Kebidanan Tahun 2020.....	II-51
GAMBAR 27 :	Grafik Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit.....	II-52

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan yang mana perencanaan ini dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan tingkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen yang disusun setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD tersebut dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD tersebut menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2021 memperhatikan kondisi keadaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengalami dampak Pandemi Covid-19 yang mana pandemi ini sudah menjadi keadaan darurat daerah dan nasional. Sesuai Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 107 Tentang Penetapan Status Siaga, Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 113 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat mulai tanggal 27 Maret 2020 - 29 Mei 2020, dan dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati No. 168 Tahun 2020 tentang Penetapan RSUD dr. Achmad Darwis sebagai Rumah Sakit Darurat Penanggulangan Covid 19 dan mulai membuka pelayanan rawat inap pasien covid 19 terhitung bulan April Tahun 2021 sampai dengan sekarang sehingga terjadi penyesuaian anggaran untuk meakomodir dan menunjang pelayanan dan penanggulan pandemic covid 19 ini.

Memperhatikan hal diatas, perlu dilakukan perubahan Renja tahun 2021 serta mengingat posisi strategis dokumen perubahan Renja tahun 2021 dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pembangunan di bidang kesehatan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Rencana kerja ini dibuat berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Suliki (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 138 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 78);

27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 60);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 ini adalah untuk menyediakan dokumen perubahan rencana tahun 2021 yang berfungsi sebagai acuan dan arahan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh RSUD dr. Achmad Darwis.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 antara lain:

1. Sebagai landasan penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021;
2. Untuk memastikan bahwa perubahan Rencana Kerja dan Anggaran RSUD dr. Achmad Darwis telah disusun berlandaskan perubahan Renja;
3. Sebagai bahan dasar dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan tahunan RSUD dr. Achmad Darwis.

Mencermati hubungan Renja RSUD dr. Achmad Darwis dengan dokumen perencanaan lainnya jelas cukup relevan, sebagaimana dapat diuraikan antara lain :

1. Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tetap mengacu dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lima puluh Kota dan Renstra RSUD dr. Achmad Darwis.
2. Penyusunan Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis mengacu kepada Perubahan RKPD Kab. Lima Puluh Kota.
3. Dokumen Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 merupakan dasar dari Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021.
4. Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis yang telah dirumuskan menjadi kerangka acuan dalam membuat Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen perubahan RKPD

- BAB II. Merupakan hasil evaluasi Renja RSUD dr. Achmad Darwis triwulan II tahun 2021 di tahun berjalan

- BAB III. Merupakan bab yang memuat Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2021 yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

- BAB IV. Merupakan bab penutup

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Triwulan II Tahun 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRWNasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2021 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2021 untuk mendapatkan target sasaran yang di rencanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun berjalan yang terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2021. Evaluasi Renja sampai triwulan II juga memperhatikan terhadap program, kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam APBD tahun 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahun 2021 dapat melihat seberapa jauh tingkat capaian yang dapat dicapai.

Dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 107 Tentang Penetapan Status Siaga, Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 113 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat mulai tanggal 27 Maret

2020 - 29 Mei 2020, surat keputusan Bupati No. 168 Tahun 2020 tentang Penetapan RSUD dr. Achmad Darwis sebagai Rumah Sakit Darurat Penanggulangan Covid 19 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Sesuai

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, terutama fokus kepada penanganan pandemi Corona-19 yang mana hal ini terjadi penyesuaian anggaran untuk mengakomodir pelayanan dan kegiatan perawatan pasien Covid-19. Hal ini diperlukan perubahan terhadap Renja tahun 2020

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Triwulan II Tahun 2021.

Tabel 1 (E. 81)

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Triwulan II Tahun 2021

NO	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT)	Realisasi		Target		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2020(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab												
					Capaian Kinerja Renstra		Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		I				II						III				IV							
					Target		Kinerja		Perangkat Daerah s/d Renja		Tahun Berjalan (2021)		K (%)		Rp				K (%)		Rp		K (%)		Rp		K (%)		Rp	
					Renstra		Kinerja		Perangkat Daerah s/d Renja		Tahun Berjalan (2021)		K (%)		Rp				K (%)		Rp		K (%)		Rp		K (%)		Rp	
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	01.02.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	78,00	6.652.911.300,00	65,58	4.363.138.912,00	75,00	643.257.000,00	12,02	77.318.280,00	15,11	97.178.308,00	-	-	-	-	27,13	174.496.588,00	68,21	4.537.635.500,00								
		01.02.02.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan materai, perangko dan pengiriman surat kilat khusus	Materai = 2.608 buah, perangko 946 buah, surat kilat khusus = 4 tahun	16.725.000,00	Materai = 1.358 buah, perangko = 646 buah dan surat kilat khusus = 2 tahun	8.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Materai = 1.358 buah, perangko = 646 buah dan surat kilat khusus = 2 tahun	8.625.000,00	51,57	RSUD AD							
		01.02.02.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/mejalah	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/mejalah	72 bulan	3.503.740.000,00	60 bulan	2.329.449.103,00	12 bulan	585.600.000,00	3 bulan	72.048.280,00	3 bulan	97.178.308,00	-	-	-	-	6 bulan	169.226.588,00	66 bulan	2.498.675.691,00	71,31	RSUD AD						
		01.02.02.01.07	Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah	72 bulan	1.189.586.000,00	Pembayaran honor = 60 bulan, honor PTT=65 bulan dan perjalanan dinas dalam daerah = 221 OH	894.190.000,00	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah/dalam kota= 71 OH	7.285.000,00	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah/dalam kota= 11 OH	1.090.000,00	-	-	-	-	-	-	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah/dalam kota= 11 OH	1.090.000,00	Pembayaran honor = 60 bulan, honor PTT=65 bulan dan perjalanan dinas dalam daerah = 232 OH	895.280.000,00	75,26	RSUD AD						
		01.02.02.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor rumah sakit	4 paket	372.326.000,00	2 paket	176.179.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	176.179.100,00	47,32	RSUD AD							
		01.02.02.01.11	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 paket	183.152.800,00	Cetak Spanduk = 8 bh, Roll banner=10 bh dan karangan bunga=6 bh	8.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cetak Spanduk = 8 bh, Roll banner=10 bh dan karangan bunga=6 bh	8.850.000,00	4,83	RSUD AD							

NO	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT)	Realisasi		Target		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Realisasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2020(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab								
					Capaian	Kinerja	Kinerja	Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2021)	I		II		III		IV						Capaian Kinerja dan Anggaran	Perangkat Daerah s/d Tahun 2020						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/5x100	16				
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp					
		01.02.02.01	17	Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman dan tamu disediakan	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan	Penggantian uang makan petugas jaga malam = 74 orang, rapat = 8.212 porsi dan tamu = 3.359 porsi	644.580.000,00	Penggantian uang makan petugas jaga malam = 74 orang, rapat = 5.388 porsi dan tamu = 2.864 porsi	589.647.000,00	Rapat = 884 porsi dan Tamu = 557 porsi	17.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penggantian uang makan petugas jaga malam = 74 orang, rapat = 5.388 porsi dan tamu = 2.864 porsi	589.647.000,00	91,48	RSUD AD
		01.02.02.01	18	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Perjalanan Dinas dalam daerah provinsi = 535 OH dan perjalanan dinas luar daerah = 483 OH	644.732.500,00	Perjalanan Dinas dalam daerah provinsi = 412 OH dan perjalanan dinas luar daerah = 421 OH	356.198.709,00	Perjalanan dinas luar daerah/biasa = 31 OH	32.452.000,00	Perjalanan dinas luar daerah/biasa = 11 OH	4.180.000,00	-	-	-	-	-	Perjalanan dinas luar daerah = 11 OH	4.180.000,00	Perjalanan Dinas dalam daerah provinsi = 412 OH dan perjalanan dinas luar daerah = 432 OH	360.378.709,00	55,90	RSUD AD				
2	Meningkatkannya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	01.02.02.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	78,00	1.323.929.150,00	38,84	514.243.025,00	75,00	64.845.000,00	-	41,96	27.205.949,00	-	-	-	-	41,96	27.205.949,00	40,90	541.448.974,00	40,90					
		01.02.02.02	05	Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Oprs yang akan diadakan	1 unit	478.225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD
		01.02.02.02	09	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	7 paket	352.362.000,00	3 paket	194.568.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 paket	194.568.000,00	55,22	RSUD AD

NO	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT)	Realisasi				Target				REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2020(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		
					Capaian		Kinerja		Kinerja		Kinerja dan Anggaran		Realisasi		Realisasi kinerja dan		Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi	Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)						
					Target		Kinerja		Renja Perangkat Daerah		Renja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja dan Anggaran		Anggaran Renstra									
					Renstra		Renstra		Tahun Berjalan (2021)		Tahun Berjalan (2021)		Renja Perangkat Daerah		Anggaran Renstra									
Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021		Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Laku (th 2020)		Tahun Berjalan (2021) yg dievaluasi		Tahun Berjalan (2021) yg dievaluasi		I	II	III	IV	13		14= 7 + 13		15=14/5x 100								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/5x 100	16
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp	
		01 02 02 02 18	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang Terpeliharaan	Kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	470.842.150,00	Kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	319.675.025,00	Kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	64.845.000,00	-	-	Kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	27.205.949,00	-	-	-	-	Kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	27.205.949,00	Kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	346.880.974,00	73,67	RSUD AD
		01 02 02 02 28	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpeliharaan	2 paket	22.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD
3	Meningkatkannya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	01 02 02 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur RS	78,00	300.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD
		01 02 02 03 01	Kegiatan : Pengadaan Penunjuk Waktu/Mesin Absensi	Jumlah mesin absensi yang akan diadakan	1 unit	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD
		01 02 02 03 02	Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang akan diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang akan diadakan	520 stel	260.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD
4	Terperuhnya Sumber Daya Rumah Sakit	01 02 02 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur	75,00	430.000.000,00	53,16	228.595.714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,16	228.595.714,00	53,16	-	-	RSUD AD
		01 02 02 05 01	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bimtek/w orkshop/sosialisasi di RS	580 orang	430.000.000,00	145 orang	228.595.714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 orang	228.595.714,00	53,16	-	-	RSUD AD

NO	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME / KEGIATAN (OUTPUT)	Realisasi				Target				REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2020(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab			
					Capaian		Kinerja		Kinerja		dan Anggaran		Realisasi		Realisasi kinerja dan		Perangkat Daerah s/d Tahun 2020								
					Target		Kinerja		Renstra		Renja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja dan Anggaran		Anggaran Renstra										
					Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021		Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun (2021) yg dievaluasi		Perangkat Daerah s/d Tahun (th 2020)		Perangkat Daerah s/d Tahun (2021) yg dievaluasi		I		II								III		IV
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/5x100	16	
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp		
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	01020206	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	78,00	29.907.800,00	74,93	22.409.550,00	75,00	3.101.800,00	6,29	195.000,00	17,49	542.600,00	-	-	-	-	23,78	737.600,00	77,40	23.147.150,00	77,40	
		01020206	01	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan , dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan	Dokumen = 45 buah dan laporan-laporan 165 lembar	29.907.800,00	Dokumen = 36 buah dan Laporan laporan dan jumlah perjalanan dinas dalam daerah = 68 OH	22.409.550,00	Dokumen = 9 buah dan Laporan laporan dan jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 17 OH	3.101.800,00	jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 2 OH	195.000,00	-	542.600,00	-	-	-	-	jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 2 OH	737.600,00	Dokumen = 36 buah dan Laporan laporan dan jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 70 OH	23.147.150,00	77,40	RSUD AD
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	01020223	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RS	Cakupan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RS	78,00	350.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01020223	08	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen masterplan rumah sakit sesuai dengan standar rumah sakit kelas C	1 dokumen masterplan	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD
7	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	01020219	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan promosi kesehatan yang akan dilaksanakan	78,00	52.500.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01020219	01	Kegiatan : Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan di RS untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan	2 paket	52.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD

NO	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Realisasi		Target		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra dan Anggaran Renja SKPD s/d Thn 2020(%)	Unit SKPD dan Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2020(%)	Penanggung Jawab							
					Capaian Kinerja	Kinerja	Kinerja dan Anggaran	Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan	I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/5x 100	16		
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp			
8	Terpe- uhinya Sumber Daya Rumah Sakit	01 02 02 26	Program Pengadaan, Peningkata- n Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Ruma- h Sakit Jiwa/Ruma- h Sakit Paru- paru/Ruma- h Sakit Mata	Persentase pemu- nuhan sumber daya rum- ah sakit sesuai standar	75,00	53.044.522.242,00	78,19	41.478.046.622,12	70,00	7.271.520.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,25		
		01 02 02 26	20 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Ambulance/ Mobil Jenazah	Jumlah kendaraan ambulance untuk pelayanan rujukan pasien	3 unit	2.554.975.000,00	2 unit	1.488.189.720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	1.488.189.720,00	58,25	RSUD AD
		01 02 02 26	04 Kegiatan : Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VIP,VIP, Kelas I,II dan III)	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit	1 gedung ICU, 1 gedung poliklinik, 1 gedung rawat inap paru, 1 paket drainase, 1 paket pemagaran, 1 gedung CSSD, 1 gedung kamar operasi, 1 gedung rawat inap, 1 gedung radiologi	17.727.696.300,00	1 gedung ICU, 1 gedung poliklinik, 1 gedung rawat inap paru, 1 paket drainase, 1 paket pemagaran, 1 gedung CSSD, 1 gedung kamar operasi, Js Konsultan Perencanaan (DED) Pemasangan MOT, 2 Paket Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif dan Js Konsultan Perencanaan (DED) Pemagaran RS	12.084.421.106,12	Pemagaran Rumah Sakit = 1 paket	914.601.879,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 gedung ICU, 1 gedung poliklinik, 1 gedung rawat inap paru, 1 paket drainase, 1 paket pemagaran, 1 gedung CSSD, 1 gedung kamar operasi, Js Konsultan Perencanaan (DED) Pemasangan MOT, 2 Paket Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif dan Js Konsultan Perencanaan (DED) Pemagaran RS	12.084.421.106,12	68,17	RSUD AD

NO	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN (OUTPUT)	Realisasi		Target		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2020(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab												
					Capaian		Kinerja		I				II						III				IV							
					Target		Kinerja		Renstra		Renja Perangkat Daerah		K (%)		Rp				K (%)		Rp		K (%)		Rp		K (%)		Rp	
					Renstra		Renstra		Perangkat Daerah s/d Tahun 2016 s/d 2021		Perangkat Daerah s/d Renja Tahun 2021		Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yg dievaluasi		K (%)				Rp		K (%)		Rp		K (%)		Rp		K (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/5x100	16						
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp							
		01.02.02.26	16	Kegiatan : Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah pembangunan instalasi pengolahan limbah RS	1 unit IPAL	1.053.425.000,00	1 unit IPAL	980.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit IPAL	980.550.000,00	93,08	RSUD AD				
		01.02.02.26	21	Kegiatan : Pengadaan alat - alat rumah sakit	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit kelas C	1 paket prasarana RS dan 24 paket alat kesehatan	27.711.950.942,00	1 paket prasarana RS dan 18 paket alat kesehatan	23.664.456.144	2 Paket Alat Kesehatan	6.356.918.711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket prasarana RS dan 18 paket alat kesehatan	23.664.456.144,00	85,39	RSUD AD				
		01.02.02.26	25	Kegiatan : Pengembangan tipe rumah sakit	Nilai Akreditasi rumah saki	Tingkat perdana, tingkat madya, SNARS, SNARS Paripurna	810.000.000,00	Tingkat Perdana	284.166.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat Perdana	284.166.620,00	35,08	RSUD AD				
		01.02.02.26	26	Kegiatan : Pembangunan Gedung Instalasi Laundry	Jumlah pembangunan sarana rumah sakit	1 gedung instalasi laundry	991.250.000,00	1 Paket Gedung Instalasi Laundry	896.873.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket Gedung Instalasi Laundry	896.873.032,00	90,48	RSUD AD				
		01.02.02.26	27	Kegiatan : Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi	Jumlah pembangunan sarana rumah sakit	1 gedung instalasi farmasi	2.195.225.000,00	1 Paket Gedung Instalasi Laundry	2.079.390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket Gedung Instalasi Laundry	2.079.390.000,00	94,72	RSUD AD				
9	Meningkatkannya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	01.02.02.27		Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	78,00	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		01.02.02.27	01	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang terpelihara	5 gedung	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD				

NO	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi				Target				REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2020(%)	Unit SKPD dan Penanggung Jawab			
					Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja	Capaian	Kinerja					
					Target	Renstra	Renstra	Renja Perangkat Daerah					Realisasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra								
					Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021	Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021	Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021	Perangkat Daerah pada Tahun 2016 s/d 2021					I	II	III	IV	Renja Perangkat Daerah yg dievaluasi	Perangkat Daerah Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)	Perangkat Daerah Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)	Perangkat Daerah Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)	Perangkat Daerah Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)	Perangkat Daerah Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/5x100	16	
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp
10	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	01.02.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	82,00	6.677.163.720,00	60,41	4.033.712.621,00	80,00	1.024.700.000,00	-	-	8,20	84.073.300,00	-	-	-	-	8,20	84.073.300,00	61,67	4.117.785.921,00	61,67		
		01.02.02.28.05	Kegiatan : Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit	Mitra RS = 19 dokumen, dr. Reveral = 20 orang dan dokter WKDS = 11 orang	4.658.905.000,00	Mitra RS = 16 dokumen, dr. Reveral = 17 orang dan dokter WKDS = 7 orang	2.495.255.500,00	Mitra RS= 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, Pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org serta PMI	774.700.000,00	-	-	Mitra RS= 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, Pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org serta PMI	14.250.000,00	-	-	-	-	Mitra RS= 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, Pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org serta PMI	14.250.000,00	Mitra RS = 20 dokumen, dokter sp. Reveral=20 orang dan dokter WKDS = 9 orang	2.509.505.500,00	53,86	RSUD AD	
		01.02.02.28.07	Kegiatan : Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	140 orang	2.018.258.720,00	167 orang	1.538.457.121,00	30 orang	250.000.000,00	-	-	7 orang	69.823.300,00	-	-	-	-	7 orang	69.823.300,00	174 orang	1.608.280.421,00	79,69	RSUD AD	
11	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	01.02.02.33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit	Persentase peningkatan mutu pelayanan BLUD Rumah Sakit	85,00	153.605.679.400,00	69,76	107.151.775.189,00	85,00	23.884.807.000,00	8,23	1.966.695.279,00	21,29	5.085.405.824,00	-	-	-	-	29,53	7.052.101.103,00	74,35	114.203.876.292,00	74,35		
		01.02.02.33.01	Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : raw at jalan dan raw at inap	Raw at Jalan = 161.662 orang dan Raw at Inap = 28.080 orang	153.605.679.400,00	Raw at Jalan = 143.619 orang dan Raw at Inap = 18.870 orang	107.151.775.189,00	Raw at Jalan = 28.864 orang dan Raw at Inap = 5.035 orang	23.884.807.000,00	Raw at Jalan = 6.394 orang dan Raw at Inap = 518 orang	1.966.695.279,00	Raw at Jalan = 4.244 orang dan Raw at Inap = 565 orang	5.085.405.824,00	-	-	-	-	Raw at Jalan = 10.638 orang dan Raw at Inap = 1.083 orang	7.052.101.103,00	Raw at Jalan = 154.257orang dan Raw at Inap = 19.953 orang	114.203.876.292,00	74,35	RSUD AD	

NO	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi		Target		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2020(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab						
					Capaian	Kinerja	Kinerja	Kinerja dan Anggaran	I		II		III		IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/5x 100	16
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	
12	Terpenuhinya Sumber Daya Rumah Sakit	01020234	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	75,00	3.582.221.300,00	85,03	3.045.959.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,03	3.045.959.090,00	85,03	
		01020234	02 Kegiatan : Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	1 paket prasarana RS dan 5 paket alat kesehatan	3.582.221.300,00	5 paket alat kesehatan	3.045.959.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 paket alat kesehatan	3.045.959.090,00	85,03	RSUD AD
13	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	10201201	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah an Daerah			100%	31.339.886.915,00	8,27	2.590.532.766,00	20,12	6.306.517.237,00	-	-	-	-	28,39	8.897.050.003,00	-	-	-	-		
		10201201	06 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan serta honorarium tim pelaksanaan kegiatan	-	181 orang	31.339.886.915,00	181 orang	2.590.532.766,00	181 orang	6.306.517.237,00	-	-	-	-	181 orang	8.897.050.003,00	-	-	-	-	-		RSUD AD

NO	Sasaran	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT)	Realisasi		Target		REALISASI KINERJA PD TRIWULAN								Realisasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2020(%)	Unit SKPD Penanggung Jawab			
					Capaian Kinerja	Kinerja	Capaian Kinerja	Kinerja	I		II		III		IV		Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yg dievaluasi	Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7 + 13		15=14/5x 100	16	
					K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	Rp		
14	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Standar Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar; Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					75,82; 85%	1.968.790.000,00															
		1.02.02.2.02.14	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kunjungan yang dilayani di RS (Pasien Covid 19)					360 orang	1.713.790.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD	
		1.02.02.2.02.32	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan yang dilayani di RS (Peserta yang di vaksinasi)					305 orang	255.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AD	
JUMLAH										66.200.908.305,00		4.634.741.325,00		11.600.923.218,00									16.235.664.543,00		
Rata - rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Pengelolaan Keuangan dengan pola PPK-BLUD																									
Faktor Penghambat pencapaiannya kinerja : Jumlah personil/ pegawai pada Jabatan Fungsional yang masih kurang																									
Tindak lanjut yg diperlukan dlm triwulan berikutnya : Evaluasi berkala dan berkelanjutan																									
Tindak lanjut yg diperlukan dlm Renja SKPD berikutnya : Menyesuaikan seluruh Sasaran dan Indikator Kinerja pada setiap tahapan dokumen																									

Berdasarkan Tabel 1 (E.81) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Triwulan II Tahun 2021 dapat di jelaskan sebagai berikut : RSUD dr. Achmad Darwis mempunyai anggaran sebesar Rp. 66.200.908.305,00 dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 16.235.664.543,00 atau 24,52 %. Masih rendahnya realisasi anggaran sampai triwulan II karena untuk realisasi yang sumber dananya dari DAK belum sepenuhnya bisa direalisasikan karena menunggu anggaran transfer daerah dari pusat. Sedangkan untuk realisasi yang bersumber dari dana BLUD masih menggunakan sistem efisiensi anggaran dengan belanja sesuai kebutuhan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr Achmad Darwis

2.2.1 Kinerja Pelayanan Medik

Kinerja pelayanan medik dapat dilihat dari kunjungan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Kinerja pelayanan rawat jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Kinerja Pelayanan Rawat Jalan RSUD dr Achmad Darwis th 2016-2020

Kinerja Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Trend 2020
Poli umum	830	181	168	98	26	Menurun
Poli Penyakit Dalam	4583	7282	7935	8362	5913	Menurun
Poli Anak	1591	1470	1734	1945	1122	Menurun
Poli Bedah	3487	4014	3804	3772	2318	Menurun
Poli Kebidanan dan Kandungan	804	1354	1595	1629	996	Menurun
Poli Mata	3721	5741	3525	4337	2652	Menurun
Poli THT	941	0	804	1457	970	Menurun
Poli gigi	765	682	640	622	224	Menurun
Poli Syaraf	2694	3107	3297	3297	2587	Menurun

Poli Kulit Kelamin	0	0	1135	1484	836	Menurun
Poli Paru	766	2039	2852	3485	2641	Menurun
Poli Jantung	904	1755	2266	3032	2509	Menurun
Poli Jiwa	15	0	731	717	929	Meningkat
Fisioth, gizi, rehabilitas medis	1382	1852	1122	1032	617	Menurun
Perinatologi/bayi	-	-	-	5	7	Meningkat
Total kunjungan	21.629	22.483	29.477	35.274	24.347	Menurun

Sumber : data MR RSUD dr. Achmad Darwis 2020

Dari data diatas terlihat bahwa total kunjungan rawat jalan pada tahun 2020 menurun 30,98% tetapi ada satu unit pelayanan yang kinerjanya meningkat seperti pelayanan Perinatologi/Bayi. Hal ini disebabkan dengan bencana non alam Pandemi Covid-19 yang mana masyarakat jadi enggan untuk mengunjungi pelayanan rawat jalan di RSUD dr. Achmad Darwis dikarenakan pengunjung yang memasuki area RSUD dr. Achmad Darwis harus sesuai protokol kesehatan dan dilakukan skiring oleh petugas.

Pelayanan poliklinik dokter umum menurun karena aturan BPJS bahwa rumah sakit hanya melayani poli spesialis karena merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 2 atau lanjutan dan untuk pelayanan dokter umum berada di Puskesmas yang mana merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1 atau dasar.

Dengan demikian kinerja pemanfaatan layanan rawat jalan tidak dapat tercapai dimana terjadi penurunan 30,98 % dibanding sebelumnya.

Kinerja pelayanan rawat inap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020

Kinerja kegiatan.	2016	2017	2018	2019	2020	Trend Th. 2020
Kunjungan Rawat Inap Peny. Dalam	1663	1061	1636	1774	940	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Bedah	888	901	848	805	403	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Anak	450	267	484	526	232	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Obgyn & Gynekologi	695	720	811	553	323	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Perinatologi	185	203	493	284	159	Menurun
Kunjungan Rawat Inap ICU	3	200	4	2	5	Meningkat
Kunjungan Rawat Inap NICU	0	0	0	0	24	-
Kunjungan Rawat Inap Penyakit Mata	22	35	15	28	4	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Paru	0	0	54	64	48	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Jantung	0	0	29	33	11	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Kulit Kelamin	0	0	4	3	3	Tetap
Kunjungan Rawat Inap Saraf	0	0	11	31	25	Menurun
Kunjungan Rawat Inap THT	0	0	13	25	22	Menurun

Kunjungan Rawat Inap Jiwa	0	0	0	1	0	Menurun
Jml Pasien	3906	3387	4402	4129	2201	Menurun

Sumber : data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat kunjungan pasien rawat inap tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 46,69 % dari tahun 2019. Terdapat beberapa peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada rawat inap ICU, namun terjadi penurunan pada kunjungan rawat inap disetiap unit pelayanan. Hal ini disebabkan bencana non alam Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan di RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2020.

Tabel 4
Indikator Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020

Kinerja kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Standar Normal (Barber Johnson)
BOR	43,95	52,00	53,60	53,60	27,70	60 – 85%
ALOS	3,30	3,90	3,50	3,90	3,30	6 – 9 hari
TOI	5,10	4,42	3,90	3,90	12,10	1 – 3 hari
BTO	40,1	39,59	43,70	43,70	21,70	40 – 50 kali
GDR	35	48	5,58	5,28	69,06	≤ 45/1000
NDR	16,5	28,3	36,5	1,86	48,16	≤ 25/1000
Jlh TT	101	101	101	101	101	

Catatan :

- Bed Occupancy Ratio (BOR) adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu.
- Average Length Of Stay (Av. LOS) adalah Rata-rata lamanya pasien dirawat
- Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur.
- Turn Over Interval (TOI) adalah Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati.
- Gross Death Rate (GDR) adalah Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

- Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.

Angka BOR RSUD dr Achmad darwis belum memenuhi standar dalam arti pelayanan RS belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini merupakan dampak kelemahan RSUD pada lokasi yang kurang strategis, sarana dan prasarana yang masih terbatas sejalan dengan ketersediaan anggaran yang masih terbatas pada pemenuhan sarana rawat inap terutama sarana ruang rawatan Kelas I dan kelas utama dan juga dampak dari Pandemi Covid-19 yang mana terjadi penurunan di setiap kunjungan di RSUD dr. Achmad Darwis.

Berdasarkan indikator kinerja rumah sakit lainnya :

1. Terlihat bahwa ada perubahan tingkat hunian rumah sakit (BOR), dimana pada tahun 2016 = 43,95% tahun 2017 = 50,20% tahun 2018 = 53,60% dan pada tahun 2019 = 53,60% dan tahun 2020 menurun 27,70% .
jumlah tempat tidur 101 TT, Ini berarti untuk pemakaian tempat tidur di rumah sakit yang ditempati pasien setiap hari masih tetap sama pada tahun 2020 ini.
2. Lama hari rawat rata penderita (Av LOS) pada tahun 2016 yaitu 3,30 hari , tahun 2017 yaitu 3,90 hari, tahun 2018 yaitu 3,50 hari, tahun 2019 yaitu 3,50 hari dan tahun 2020 yaitu 3,70 hari.
hampir sama lama dirawat dibandingkan tahun 2019 yaitu 3 hari, dan ini lebih rendah dari standar nasional (6-9) hari. Angka ini menggambarkan tiga hal :
 - Pasien cepat sembuh, tingginya tingkat pelayanan pasien.
 - Paket klaim BPJS dengan pelayanan INA CBGs merubah pola pelayanan agar pasien cepat sembuh karena nilai pembayaran tidak berdasarkan lama rawatan akan tetapi paket diagnosa sehingga pasien dengan grup yang sama akan dibayarkan sama tanpa mempertimbangkan lama rawatan.
 - Pasien pulang meninggal atau dirujuk.
3. Angka BTO yang 21 kali menggambarkan bahwa satu tempat tidur rata-rata dipakai 21 kali oleh penderita selama satu tahun. Angka ini berarti frekwensi pemakaian tempat tidur akan bertambah dibanding tahun sebelumnya, Tahun 2019 yaitu 43 kali dan tahun 2020 yaitu 21 kali.

4. Angka TOI yang 12 hari menggambarkan bahwa 1 tempat tidur mengganggu (tidak ditempati pasien) sebelum ditempati pasien berikutnya rata-rata 12 hari. Hal ini menunjukkan lama tempat tidur mengganggu tahun 2019 yaitu 3 hari sedangkan pada tahun 2020 yaitu 12 hari.

Tabel 5
Data Hari Rawatan di Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2016-2020

Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Trend Tahun 2020
Hari Rawatan Rawat Inap Peny. Dalam	7125	7920	7528	6610	4669	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Bedah	3636	3575	3711	2414	1844	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Anak	2075	1833	2267	1778	1201	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Obgyn & Gynekologi	2482	2205	2876	1380	1111	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Perinatologi	858	988	2172	1032	700	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap ICU	8	11	16	5	10	Meningkat
Hari Rawatan Rawat Inap Penyakit Mata	62	109	30	35	9	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Jantung	0	83	123	118	50	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Paru	0	172	239	277	274	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Saraf	0	43	37	157	137	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Kulit dan Kelamin	0	20	23	28	19	Menurun

Hari Rawatan Penyakit THT	0	0	62	80	77	Menurun
Hari Rawatan Penyakit Jiwa	0	0	0	4	0	Menurun
Jumlah Hari Rawatan	16246	16959	19084	13918	10239	Menurun

Sumber: data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020.

Dari tabel diatas terlihat jumlah hari rawatan pasien rawat inap tahun 2020 terjadi penurunan 26,43% dari tahun 2019. Terdapat penurunan yang cukup signifikan jumlah hari rawatan yaitu pada seluruh unit pelayanan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis, hal ini disebabkan karena bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19 sehingga terjadi penurunan disetiap unit pelayanan yang ada. Sedangkan peningkatan jumlah hari rawatan pada rawatan ICU.

Tabel 6
Data Kunjungan Gawat Darurat dan Kamar Operasi th 2016-2020

Kinerja Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	Trend 2020
Kunj IGD	5851	5704	6694	6789	4433	Menurun
Op. Besar	5343	817	769	798	340	Menurun
Op. Sedang	422	463	574	463	286	Menurun
Op. Kecil	21	8	7	12	8	Menurun
Op obgyn	300	331	369	317	122	Menurun
Jumlah kunj Operasi	6086	1288	1350	1273	756	Menurun

Sumber: data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020

Dari data diatas terlihat penurunan jumlah kunjungan IGD pada tahun 2020 dibanding rata-rata tahun 2019 yaitu sebesar 34,70%. Sedangkan untuk pelayanan operasi di kamar operasi/bedah rumah sakit pada tahun 2020 terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 40,61%. Hal ini disebabkan adanya bencana non alam Pandemi Covid-19.

2.2.2 Kinerja Pelayanan Penunjang

Kinerja pelayanan penunjang dapat dilihat dari kunjungan pelayanan laboratorium, radiologi dan pelayanan farmasi seperti tabel berikut :

Tabel 7

Kinerja Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr. Achmad Darwis Th2016-2020

Kinerja keg.	2016	2017	2018	2019	2020	Trend 2020
Kunj. laboratorium	9.180	13.749	42.815	18.389	13.592	Menurun
Kunj. Radiologi	3.585	3.950	3.697	4.368	3.246	Menurun
Jlh R/ farmasi	114.461	112.297	190.469	203.402	135.732	Menurun
Kunj. Rehabilitasi Medik	1.307	1.723	1.283	1.608	549	Menurun
Kunj. UTDRS	715	819	667	564	606	Meningkat

Sumber : data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020

Dari tabel diatas trend kinerja pelayanan penunjang meningkat. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan kunjungan yang signifikan dalam tahun 2020 pada semua kunjungan di Laboratorium 26,08%, Radiologi 25,68%, Farmasi 33,27% dan Rehabilitasi Medik 65,86%. Kunjungan Pelayanan UTDRS meningkat sebesar 7,45% dibandingkan tahun kemarin.

Penilaian mutu pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis belum dievaluasi secara keseluruhan. Tabel dibawah ini menunjukkan beberapa penilaian yang telah dilakukan di RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020.

Tabel 8

Evaluasi Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Capaian
1	Terpenuhi sumber daya rumah sakit	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	70,00%	80,46%

2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	80,00%	81,72%
3	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00%	80,36%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	75,00%	67,25%

Analisis dan Capaian Kinerja

1. Terpenuhinya Sumber Daya Rumah Sakit

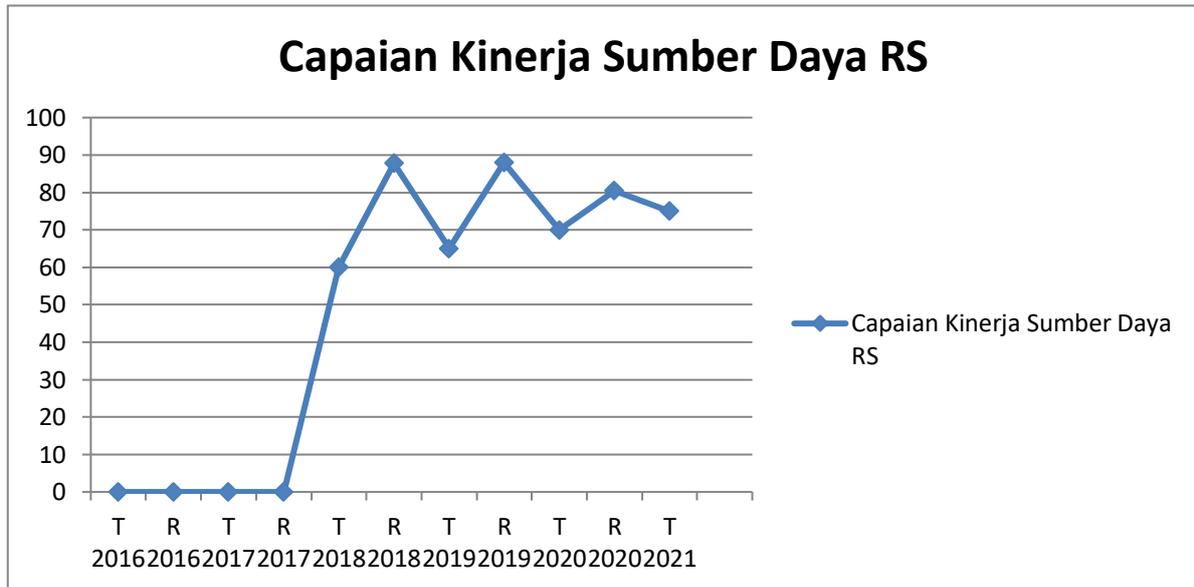
Tabel 9
Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target RPJM D	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar		-	-	-	-	60	87,8	65	87,98	70	80,46	75	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit dari tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 1

Grafik Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit



Dari Grafik Capaian Kinerja Sumber Daya Rumah Sakit di atas dapat dilihat bahwa Target tahun 2016 = 0 dengan Realisasi tahun 2016 = 0, Target tahun 2017 = 0 dengan Realisasi tahun 2017 = 0, Target tahun 2018 = 60% dengan Realisasi tahun 2018 = 87,83% , Target tahun 2019 = 65% dengan Realisasi tahun 2019 = 87,98% sedangkan untuk Target tahun 2020 = 70% dengan Realisasi tahun 2020 = 80,46% dan Target tahun 2021 = 75%.

Indikator ini adalah rata-rata jumlah komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis yang tersedia sesuai standar. Adapun komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis terdiri dari :

1. Persentase jenis obat yang terpenuhi.
2. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar.
3. Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.

Rumus :

$$\frac{(\% \text{ jenis obat yang terpenuhi} + \% \text{ SDM yang sesuai standar} + \% \text{ ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes sesuai standar})}{3} \times 100\%$$

$$\frac{76,78 + 100,99 + 63,60}{3} \times 100\%$$

$$\frac{241,37}{3} \times 100\% = \mathbf{80,46\%}$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sumber daya rumah sakit sesuai standart di RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 adalah sebesar 80,46%.

Adapaun penjelasan komponen – komponen yang termasuk dalam sumber daya rumah sakit sesuai standart adalaha sebagai berikut :

1. Persentase Jenis Obat yang Terpenuhi

Jenis obat yang di rencanakan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 sebanyak 422 jenis obat, sedangkan pengadaan atau pembelian obat pada tahun 2020 sebanyak 324 jenis obat yang terpenuhi.

Jumlah item pembelian, pengadaan dan pemakaian obat fluktuatif per bulan pelayanan. Permintaan, pembelian dan penyediaan obat tergantung kasus penyakit yang ada perbulannya dengan memperhatikan pemakaian bulan sebelumnya, apabila tidak ada pemakaian/ kasus bulan berjalan maka tidak diadakan pembelian bulan berikutnya demikian juga sebaliknya.

Penyusunan dan perencanaan di RBA merujuk kepada RKO Nasional berdasarkan pola konsumsi pada tahun sebelumnya. Pembelian vaksin tidak direncanakan di RSUD dr. Achmad darwis dan apabila ada kasus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Propinsi.

Adapun perhitungan jenis obat yang terpenuhi selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

RUMUS :

$\frac{\text{Jumlah jenis obat yang dibeli}}{\text{Jumlah jenis obat yang dianggarkan}} \times 100 =$

$\frac{324}{422} \times 100 = 76,78\%$

422

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen Persentase Jenis Obat yang Terpenuhi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis pada tahun 2020 adalah sebesar 76,78 %.

Dokumentasi Kegiatan Sumber Daya Rumah Sakit Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020 :

GAMBAR 2

Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020



GAMBAR 3

Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020



GAMBAR 4

Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2020



2. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar pada tahun 2020 adalah :
- a. Jumlah pegawai yang harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

Pada Tahun 2020 Jumlah Pegawai yang harus memiliki STR ditargetkan sebanyak 230 orang (seharusnya sebanyak 251 orang) , terealisasi sebanyak 250 orang.

Rincian jumlah pegawai yang harus memiliki STR sebanyak 251 orang adalah sebagai berikut :

No	Nama Profesi	STR	
		Ada	Tidak Ada
1	Profesi Dokter 35 Orang	√	-
2	Perawat 113 orang.	√	-
3	Perawat Gigi 3 orang.	√	-
4	Penata Anestesi 4 orang.	√	-
5	Bidan 45 orang.	√	-
6	Apoteker 6 orang.	√	-
7	Teknis Kefarmasian 10 orang	√	-
8	Kesling 1 orang.	-	√
9	Gizi 2 orang.	√	-
10	Fisioterapi 3 orang	√	-

11	Radiografer 6 orang.	√	-
12	Elekromedis 1 orang.	√	-
13	Refraksi Optision 2 orang.	√	-
14	Ahli Tekhnologi Laboratorium 11 orang.	√	-
15	Perekam Medis 9 orang.	√	-

Perhitungan : $\frac{250}{251} \times 100 = 99,60 \%$

251

- b. Jumlah pegawai rumah sakit yang akan mengikuti diklat, sosialisasi, workshop dan Bimtek.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, sosialisasi, workshop dan bimtek pada tahun 2020 di targetkan 376 orang, terealisasi sebanyak 385 orang.

Perhitungan : $\frac{385}{376} \times 100 = 102,39\%$

376

Adapun diklat, Sosialisasi, workshop dan bimtek yang diikuti pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Mengikuti seminar dan workshop tentang strategi dan deteksi dini perubahan kondisi klinis anak yang dirawat di rumah sakit sebanyak 2 orang.
- Mengikuti workshop Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) sebanyak 2 orang.
- Mengikuti sosialisasi relasi psikologi dan komunikasi efektif tenaga kesehatan terhadap pasien dan sejawat sebanyak 25 orang.
- Mengikuti bimbingan akreditasi untuk Pokja Akses ke Rumah sakit dan Kontinuitas (ARK), Pokja Asesmen Pasien (AP), Pokja Pelayanan Asuhan Pasien (PAP) dan Pokja Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) sebanyak 100 orang.

- Mengikuti pelatihan pelayanan darah bagi perawat di Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD-RS) angkatan I sebanyak 1 orang.
- Mengikuti bimbingan akreditasi untuk Pokja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pokja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Pokja Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) dan Pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) sebanyak 105 orang.
- Mengikuti bimbingan akreditasi untuk Pokja Sasaran Keselamatan Pasien (MFK), Pokja Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pokja Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) dan Pokja Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS) sebanyak 75 orang.
- Mengikuti pelatihan pembinaan dan serifikasi Manajemen Risiko Rumah Sakit sebanyak 2 orang.
- Mengikuti bimbingan akreditasi untuk Pokja Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE), Pokja Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM) dan Pokja Program Nasional (Prognas) sebanyak 70 orang.
- Mengikuti pelatihan Swab sebanyak 1 orang.
- Mengikuti pelatihan MPP sebanyak 2 orang.

Perhitungan Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar pada tahun 2020 adalah :

RUMUS :

Jml pegawai yang harus memiliki STR + Jml pegawai RS yg akan mengikuti diklat, sos, workshop dan Bimtek X100%

2

$$\frac{99,60 + 102,39}{2} \times 100\% = 100,99 \%$$

2

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2020 adalah sebesar 100,99 %.

Dokumentasi Kegiatan Sumber Daya Rumah Sakit Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Tahun 2020 :

GAMBAR 5
Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2020



GAMBAR 6
Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2020



GAMBAR 7
Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2020



GAMBAR 8

Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2020



3. Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standart

- Sarana

Sarana yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis ada sebanyak 9 gedung pelayanan, menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sarana yang tertuang sebanyak 13 gedung pelayanan, jadi ada kekurangan 4 gedung pelayanan menurut standar Permenkes tersebut yang tertuang pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas.

Sarana yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis (9 Gedung Pelayanan) tersebut belum memenuhi atau mencukupi standar Permenkes, seperti gedung Laboratorium, gedung Radiologi, Gedung Gizi, Gedung Medical Record (MR) dan Gedung Pemulasaran Jenazah sehingga capaian bobot sarana sampai akhir tahun 2020 yang terinput dalam Aplikasi Sarana,

Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) di RSUD dr. Achmad Darwis adalah **71,62%**.

Kondisi saat ini ada 6 gedung lama yang tidak sesuai standart yang sudah harus direnovasi atau direhab sebagaimana tertuang dalam masterplan RSUD dr. Achmad Darwis.

Dokumentasi Kegiatan Sumber Daya Rumah Sakit Pengadaan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Tahun 2020 :

GAMBAR 9
Dokumentasi Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)



- Prasarana

Prasarana menurut Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah 23 unit, sedangkan prasarana yang telah ada di RSUD dr. Achmad Darwis sekarang adalah 15 unit, jadi kekurangan prasarana sampai saat ini adalah 8 unit, menurut standar

Permenkes tersebut yang tertuang pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Prasarana yang ada saat ini di RSUD dr. Achmad Darwis ada beberapa yang menumpang pada gedung pelayanan yang lain seperti IPSRS berada di gedung Gizi, Kesling berada di gedung poliklinik lama, sesuai daftar analisa. Capaian bobot prasarana sampai akhir tahun 2020 yang terinput dalam Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) adalah **68,57%**.

- Alat Kesehatan

Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 total alat kesehatan yang ada sebanyak 1.995 unit alat kesehatan, sedangkan alat kesehatan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis saat ini 1.297 unit alat kesehatan yang sesuai standart Permenkes tersebut yang tertuang pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Masih banyak jenis alat kesehatan sesuai standart yang belum ada di RSUD dr. Achmad Darwis, dapat dilihat kekurangan alat kesehatan sebanyak 698 unit di setiap ruangan pelayanan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis. Sehingga capaian bobot Alat Kesehatan sampai akhir tahun 2020 yang terinput dalam Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kondisi alat kesehatan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis sampai tahun 2020 adalah **50,60%**.

Kondisi alat kesehatan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis saat ini \pm 15% diantaranya adalah alat lama yang sudah harus diganti dengan alat baru dengan teknologi yang baru karena dari fungsinya banyak tidak terpakai lagi oleh user secara maksimal disebabkan karena sering rusak. Ketika diperbaiki oleh tenaga IPSRS tidak bertahan lama, jadi secara ekonomis juga tidak efisien lagi.

GAMBAR 10
Dokumentasi Pengadaan Alkes Emergency Stretcher Tahun 2020



GAMBAR 11
Dokumentasi Pengadaan Alkes Monitor For Laparoscopy Tahun 2020



GAMBAR 12
Dokumentasi Pengadaan Alkes Laparoscopy Tahun 2020



GAMBAR 13
Dokumentasi Pengadaan Alkes Ventilator Transport Tahun 2020



GAMBAR 14
Dokumentasi Pengadaan Alkes Syringe Pump & Infuse Pump Tahun 2020



Perhitungan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standart pada tahun 2020 adalah :

RUMUS :

$$\frac{\text{Persentase sarana} + \text{Persentase prasarana} + \text{Persentase alat kesehatan}}{100\%} \times$$

3

$$\frac{71,62 + 68,57 + 50,60}{3} \times 100\% = 63,60\%$$

3

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2020 adalah sebesar 63,60 %.

Adapun kegiatan tahun 2020 yang mendukung keberhasilan untuk terpenuhinya sumber daya rumah sakit yaitu persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Ketersediaan Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Sesuai Standar Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan : Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) - Kegiatan : Pengadaan Alat – Alat Rumah Sakit 	<p>Rp. 910.904.499,00</p> <p>Rp. 5.296.570.000,00</p>
2	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal BLUD 	<p>Rp. 1.150.000.000,00</p>
Jumlah		Rp. 7.357.474.499,00

Sedangkan untuk Komponen Pengadaan obat dan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit kegiatannya berada pada anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Darwis pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2020 adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 11
 Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Jenis Obat Yang
 Terpenuhi dan Persentase Sumber Daya Manusia (SDM)
 Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD - Belanja Obat-Obatan - Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal RS	Rp. 3.658.088.700,00 Rp. 273.028.355,00
	Jumlah	Rp. 3.931.117.055,00

2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

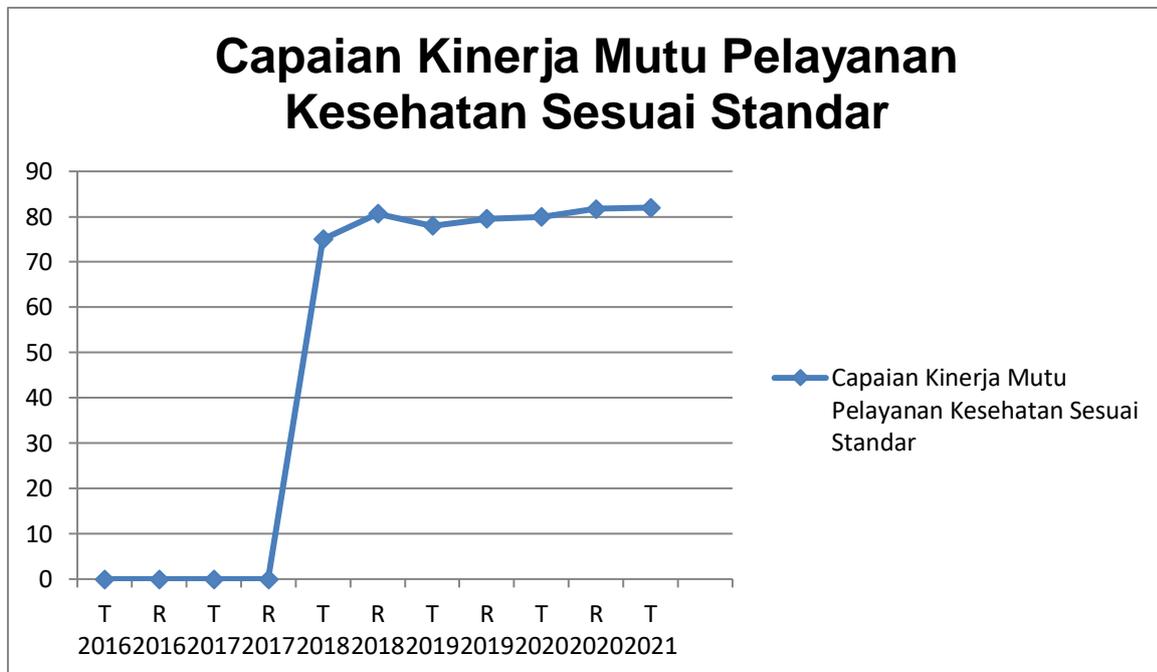
Tabel 12
 Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	
1	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target		-	-	-	-	75%	80,6%	78%	79,5%	80%	81,7%	82%	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar dari tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 15

Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar



Dari Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di atas dapat dilihat bahwa Target tahun 2016 = 0 dengan Realisasi tahun 2016 = 0, Target tahun 2017 = 0 dengan Realisasi tahun 2017 = 0, Target tahun 2018 = 75% dengan Realisasi tahun 2018 = 80,65% , Target tahun 2019 = 78% dengan Realisasi tahun 2019 = 79,57%, Target tahun 2020 = 80% dengan Realisasi tahun 2020 = 81,72% dan Target tahun 2021 = 82%.

Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target merupakan indikator yang diukur untuk menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Trend capaian persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target 78% Tahun 2019.

Capaian persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target pada tahun 2020 sebesar 81,72%.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Achmad Darwis terdiri dari 22 jenis pelayanan dan 93 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Masing – masing Bidang dan Sekretariat mempunyai jenis pelayanan dan indikator standar pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat. RSUD dr. Achmad Darwis telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum daerah RSUD dr. Achmad Darwis, Berlaku untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

RSUD dr. Achmad Darwis memiliki 22 jenis pelayanan dan 93 indikator pelayanan SPM. Pada masing – masing bidang dan sekretariat memiliki berbeda beda jumlah jenis layanan dan indikator layanan sesuai dengan tupoksi masing – masing bidang dan sekretariat. Pembagian jenis pelayanan dan indikator pelayanan pada masing – masing bidang yaitu sekretaris dengan 2 jenis pelayanan dan 11 indikator pelayanan, bidang sarana, prasarana dan logistik dengan 4 jenis pelayanan dan 10 indikator pelayanan, bidang pelayanan medis dan keperawatan dengan 8 jenis pelayanan dan 44 indikator pelayanan, sedangkan untuk bidang penunjang dan promosi pengembangan rumah sakit dengan 8 jenis pelayanan dan 28 indikator pelayanan.

Dari penjelasan di atas, didapat perhitungan persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing – masing bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 11
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 10
2. Bidang Sarana, prasarana dan Logistik
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 10
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 7
3. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

- Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 44
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 38
4. Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi Pengembangan Rumah Sakit
- Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 28
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 21

Sehingga jumlah seluruh indikator pelayanan SPM RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 sebanyak 93 indikator, sedangkan jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target sebanyak 76 indikator dan indikator pelayanan SPM yang tidak mencapai target sebanyak 17 indikator.

Maka adapun perhitungan untuk persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target adalah sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target}}{\text{Seluruh Indikator SPM Rumah Sakit}} \times 100\%$$

$$\frac{76}{93} \times 100 = 81,72\%$$

Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit mencapai target, dari target dari 80% terealisasi sebesar 81,72%.

Standar Pelayanan Minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan, karena indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.

Adapun kegiatan tahun 2020 yang mendukung keberhasilan untuk meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai standar adalah sebagai berikut :

Tabel 13

Program dan Kegiatan yang Mendukung Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang Mencapai Standar Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan : Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis - Kegiatan : Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu 	Rp. 582.284.000,00 Rp. 250.000.000,00
	Jumlah	Rp. 832.284.000,00

Dokumentasi Kegiatan Mutu Pelayanan Sesuai Standar RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020

GAMBAR 16
Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Mata



GAMBAR 17
Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Penyakit Dalam



GAMBAR 18
Dokumentasi Pelayanan Rongent Di Instalasi Radiologi



GAMBAR 19
Dokumentasi Pelayanan Makan Pasien Di Instalasi Gizi



3. Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Sakit

Tabel 14

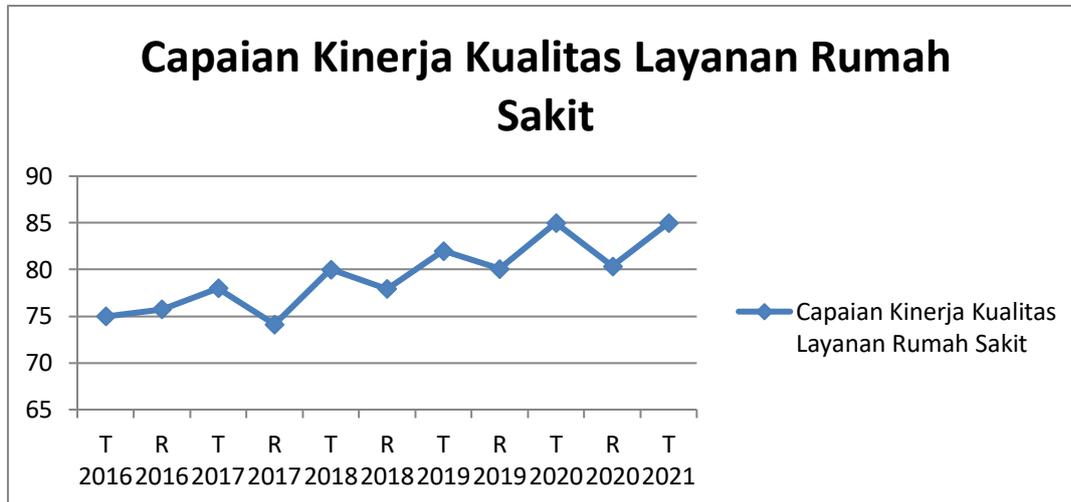
Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	Ket
			2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75%	75,75%	78%	74,13%	80%	77,94%	82%	80,08%	85%	80,36%	85%	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit dari tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 20

Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit



Dari Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit di atas dapat dilihat bahwa Target tahun 2016 = 75% dengan Realisasi tahun 2016 = 75,75%, Target tahun 2017 = 78% dengan Realisasi tahun 2017 = 74,13%, Target tahun 2018 = 80% dengan Realisasi tahun 2018 = 77,94% , Target tahun 2019 = 82% dengan Realisasi tahun 2019 = 80,08%, Target tahun 2020 = 85% dengan Realisasi tahun 2020 = 80,36% dan Target tahun 2021 = 85%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahuidari adanya berbagai keluhan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas RSUD dr.Achmad Darwis baik pelayanan di rawat jalan, administrasi, laboratorium, farmasi, IGD maupun rawat inap, yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima,maka RSUD dr.Achmad Darwis berupaya meningkatkan kinerja pelayanan. Untuk menilai seberapa bagus kualitas pelayanan

yang diberikan maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat di RSUD dr.Achmad Darwis.

Hasil penyusunan IKM ini akan dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Kegiatan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2020 ini merupakan survey kesembilan untuk RSUD dr. Achmad Darwis. Survey dilakukan pada bulan akhir Juli sampai dengan awal bulan September 2020 di RSUD dr. Achmad Darwis.

Analisis Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Data yang diambil yaitu data primer, melalui kuesioner. Sampel yang diambil berjumlah 300 responden (dengan mempedomani tabel Morgan dan Krejcie). Pengisian dilakukan dengan tatap muka langsung. Kuesioner diisi langsung oleh responden.

Perhitungan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengukuran skala Likert

a. Setiap pertanyaan survey masing-masing unsur diberi nilai

Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan SKM terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Bobot NRT} = \frac{\text{Jumlah Bobot} = 1}{\text{Jumlah Unsur}} = N$$

N = Bobot Nilai per Unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Perspsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 15

Nilai persepsi, Nilai Interval (NI), Nilai Interval Konversi (NIK), mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai persepsi	(NI)	(NIK)	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat baik

2. Pengolahan data survey

Pengolahan data survey dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Pengolahan dengan komputer
- b. Pengolahan secara manual

3. Laporan hasil penyusunan indeks

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

Deskripsi Hasil Analisis

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada 300 orang responden dapat memberikan informasi kelompok mana yang dominan sehingga peningkatan kualitas pelayanan dapat

dirancang dan diarahkan sesuai jenis kelamin yang dominan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 16

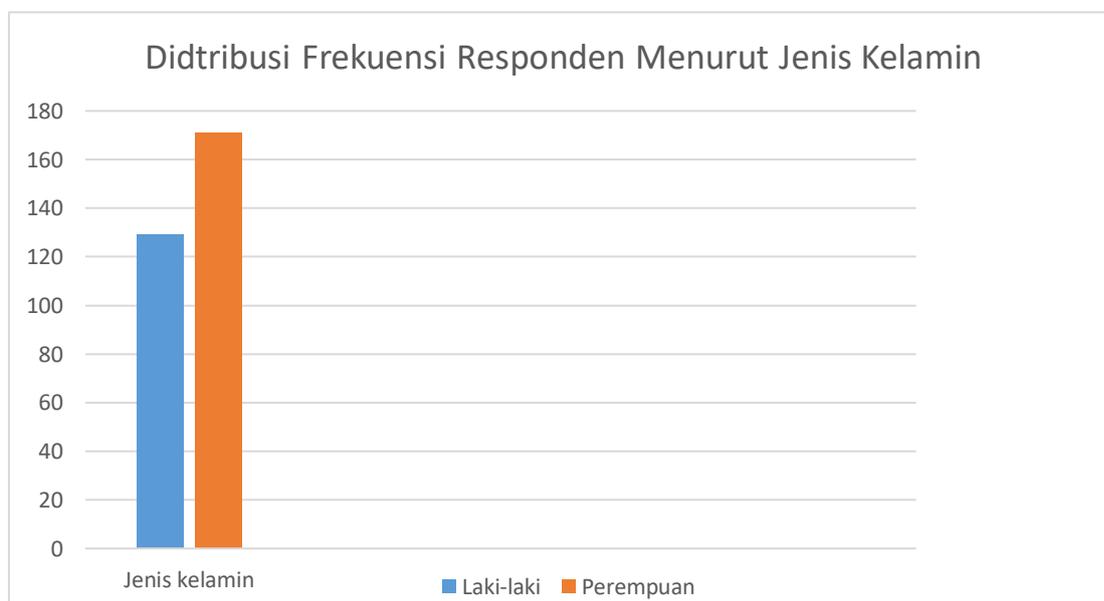
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Kategori Jenis Kelamin	Jumlah	
		Jumlah	(%)
1	Laki-laki	129	43
2	Perempuan	171	57
	Jumlah	300	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden perempuan dominan sebagai pengguna jasa pada RSUD dr.Achmad Darwis yaitu sebanyak 171 orang (57%) sedangkan responden laki-laki sebanyak 129 orang (43%).

Gambar 21

Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 17

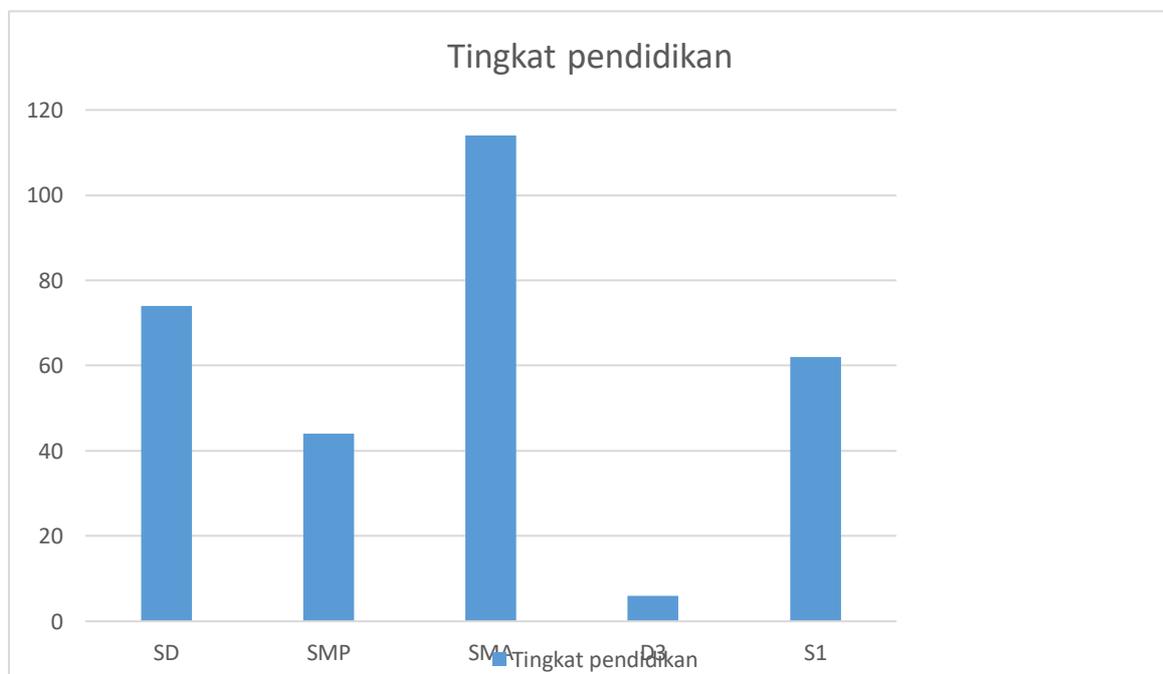
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1	SD	74	24.7
2	SLTP	44	14.6
3	SLTA	114	38
4	D3	6	2
5	S1	62	20.7
6	S2	-	-
	Jumlah	300	100

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa responden terbanyak yaitu tingkat pendidikan SLTA (38%), diikuti dengan kelompok pendidikan SD (24,7%).

Gambar 22

Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

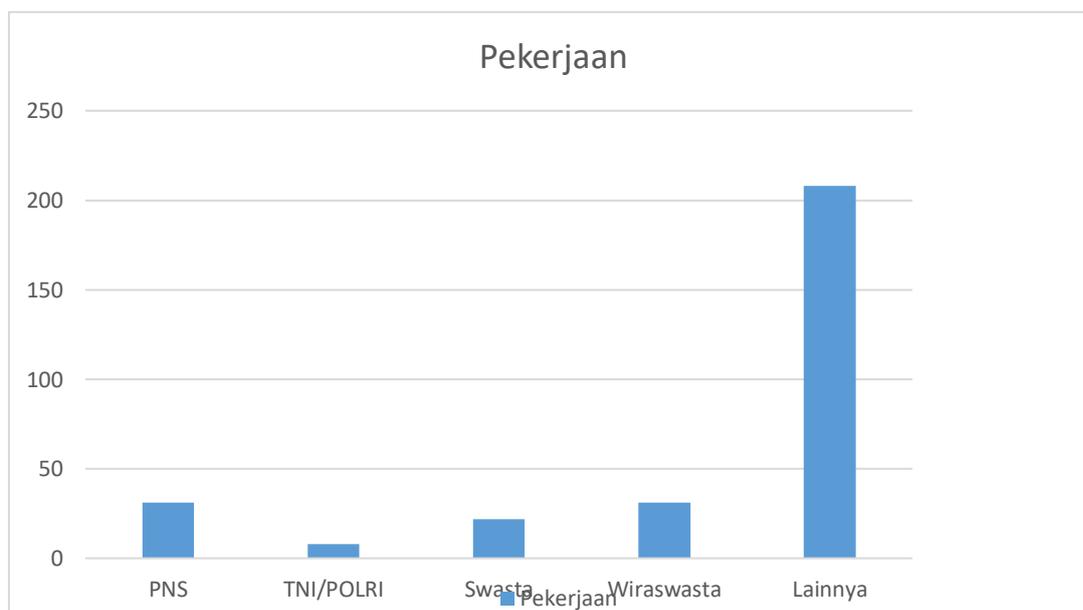
Tabel 18
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	31	10,3
2	TNI/POLRI	8	2,7
3	Swasta	22	7,4
4	Wiraswasta	31	10,3
5	Lainnya	208	69,3
Jumlah		300	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dengan status pekerjaan lainnya seperti petani, pedagang, pelajar dan sebagainya. Sedangkan minoritas responden yaitu dengan status pekerjaan sebagai TNI/POLRI. Pekerjaan responden bermanfaat dalam memahami kemampuan ekonomi dan ekpektasi serta persepsi masyarakat pengguna jasa layanan RSUD dr.Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 23

Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan



Hasil Perhitungan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Analisis data survey kepuasan masyarakat di RSUD dr. Achmad Darwis dilakukan dengan sistem pengolahan data secara komputerisasi pada microsoft exell. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 19
Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Per Unsur di RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020

Nomor	Unsur pelayanan	Nilai interval	Kinerja
U1	Persyaratan	3,25	Baik
U2	Prosedur	3,2	Baik
U3	Waktu pelayanan	3	Baik
U4	Biaya/tarif	3,3	Baik
U5	Produk layanan	3,2	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,3	Baik
U7	Prilaku pelaksana	3,3	Baik
U8	Sarana dan prasarana	3	Baik
U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,5	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa unsur sarana dan prasarana pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis perlu menjadi prioritas perhatian dalam meningkatkan pelayanan. Masalah waktu pelayanan juga tidak kalah penting. Pelanggan tentu menginginkan mendapatkan pelayanan yang tepat waktu.

Dari hasil penilaian IKM per unsur maka didapatkan nilai IKM di RSUD dr. Achmad Darwis yaitu **80,36** yang tergolong dalam kriteria kinerja "**BAIK**".

Pembahasan

Semua unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Terdapat dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik yaitu :

- a. Indikator efisiensi, dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Indikator sufisiensi, dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat dan pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari survey yang dilakukan maka didapatkan nilai SKM sebesar 3.2 yang berada dalam Nilai Interval (NI) 3.06-3.53. Sehingga di dapatkan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 80,04 dengan Nilai Interval Konversi (NIK) antara 76.61 - 88.30. Angka ini menunjukkan bahwa Mutu Pelayanan yang diberikan di RSUD dr. Achmad Darwis mendapatkan nilai B yang berarti Kinerja Unit Pelayanan “Baik”. Bila dibandingkan dengan hasil survey pada tahun 2019 nilai IKM sebesar 80,01, maka terdapat peningkatan.

Istilah-istilah dalam penilaian IKM :

1) Unsur Persyaratan

Persyaratan untuk melakukan pengobatan ke RSUD dr. Achmad Darwis telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil survey dari unsur persyaratan maka diperoleh nilai yaitu 3,25 dengan kriteria “ BAIK”.

2) Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis telah dibuat standar yakni dengan Standar

Prosedur Operasional (SPO) pada setiap jenis layanan. Berdasarkan hasil survey dari unsur prosedur pelayanan maka diperoleh nilai yaitu 3,2 dengan kriteria “BAIK”.

3) Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya persyaratan teknis dan administrasi hingga selesainya suatu proses pelayanan. Standar waktu pelayanan sangat penting bagi pengguna layanan untuk kejelasan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang mereka terima di tempat pelayanan. Kecepatan waktu pelayanan sangat ditentukan dengan ketepatan waktu pelayanan. Pada hasil survey dengan nilai skor terendah dari semua unsur pelayanan yaitu unsur waktu pelayanan dengan nilai 3. Walaupun masih dalam nilai baik, tetapi dengan skor terendah, tetap harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan di poliklinik terkait waktu tunggu pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis yaitu :

1. Belum terpenuhinya jumlah dokter spesialis pada tiap jenis pelayanan sehingga satu orang dokter masih harus tugas rangkap di rawat jalan, ICU, kamar operasi dan rawat inap pada hari yang sama.
2. Sebagian tenaga dokter spesialis masih tenaga referal dari rumah sakit lain yang kedatangannya setelah selesai pelayanan di rumah sakit asal
3. Adanya kondisi-kondisi khusus atau kegawatan pasien yang mengharuskan dokter terlebih dahulu harus melayani pasien di rawat inap, ICU atau kamar operasi
4. Sistem pendaftaran dan pencarian berkas rekam medik pasien kadang masih terkendala karena persoalan jaringan internet

4) Biaya/tarif

Kepuasan pasien terhadap variabel biaya/tarif pelayanan didapatkan angka 3,3 dengan kriteria “BAIK”. Ini kemungkinan terjadi karena sebagian besar pasien adalah peserta BPJS sehingga tidak dikenakan pembayaran saat melaksanakan pengobatan di RSUD dr. Achmad Darwis.

5) Produk layanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa unsur produk layanan mendapatkan nilai 3,2 dengan kriteria “BAIK”.

6) Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta pengalaman yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa unsur kompetensi pelaksana mendapatkan nilai 3,3 dengan kriteria “BAIK”.

7) Perilaku pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap, tingkah laku dan etika pemberi pelayanan saat melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa unsur perilaku pelaksana mendapatkan nilai 3,3 dengan kriteria “BAIK”.

8) Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Di rumah sakit sarana dan prasarana meliputi semua fasilitas yang digunakan oleh pengunjung selama mendapatkan pelayanan, seperti fasilitas parkir, taman, ruang tunggu, kamar mandi, ruang pemeriksaan dsb. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa unsur sarana prasarana mendapatkan nilai 3, dimana kepuasan terhadap variabel sarana dan prasarana ini merupakan nilai paling rendah. Hal itu dapat disebabkan karena adanya beberapa penyesuaian terkait pelayanan di era pandemi Covid-19 baik alur, jumlah kursi tunggu di ruangan tunggu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pasien. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana di RSUD dr. Achmad Darwis Suliki harus diperhatikan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien.

9) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah prosedur, sarana dimana pasien dan atau keluarganya menyampaikan keluhan, masukan dan saran kepada rumah sakit atas pendapat, kepuasan atau ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang diterima. Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan nilai 3,5 dengan kriteria "BAIK".

Rencana Tindak Lanjut

- 1) Dilakukan pembinaan berkala kepada semua lini untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan target semua unsur dapat bernilai sangat baik.
- 2) Melakukan supervisi berkala untuk semua sarana prasarana agar kualitas sarana prasarana terus dapat ditingkatkan
- 3) Melakukan perluasan ruangan tunggu pasien rawat jalan
- 4) Melakukan pembinaan berkala kepada semua karyawan terkait kedisiplinan waktu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna layanan pada RSUD dr. Achmad Darwis.

Adapun kegiatan tahun 2020 yang mendukung keberhasilan untuk meningkatnya kualitas layanan rumah sakit yaitu bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan rumah sakit. Diantara kegiatannya adalah :

Tabel 20
Program dan Kegiatan yang Mendukung
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Rp. 19.022.257.200,00
	Jumlah	Rp. 19.022.257.200,00

Dokumentasi Kegiatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Tahun 2020 :

GAMBAR 24

Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Gawat Darurat Tahun 2020



GAMBAR 25

Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Farmasi Th 2020



GAMBAR 26

Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Rawat Inap Kebidanan Th 2020



4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Rumah Sakit

Tabel 21

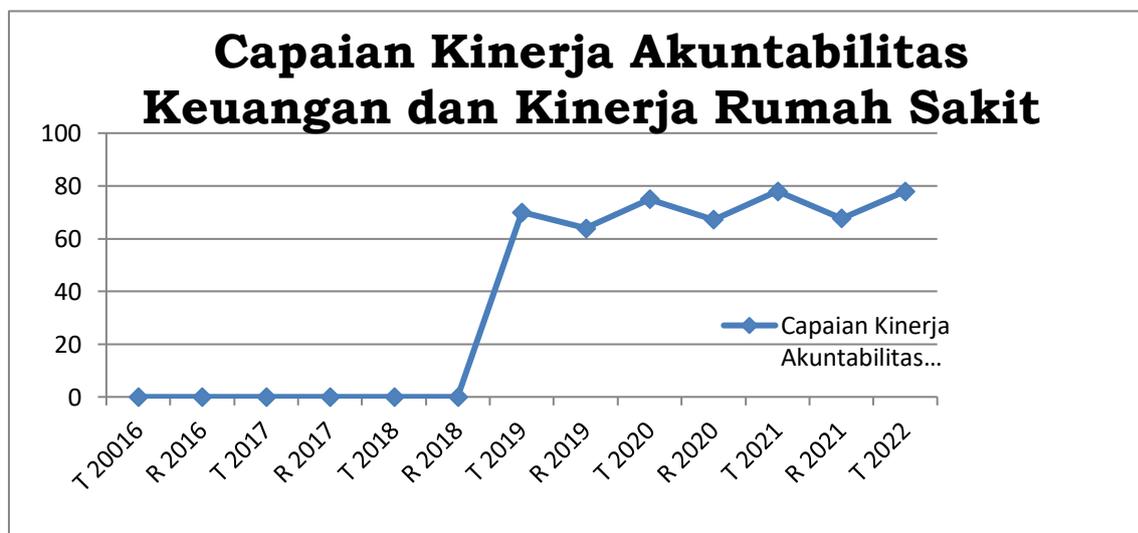
Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	Ket
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit		-	-	-	-	-	-	70%	63,89%	75%	67,25%	78,00%	67,74%	78,00%	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit dari tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 27

Grafik Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit



Dari Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit di atas dapat dilihat bahwa Target Tahun 2016 = 0 dengan Realisasi = 0, Target Tahun 2017 = 0 dengan Realisasi Tahun 2017 = 0, Target Tahun 2018 = 0 dengan Realisasi = 0, Target Tahun 2019 = 70% dengan Realisasi = 63,89%, Target Tahun 2020 = 75% dengan

Realisasi = 67,25%, Target Tahun 2021 = 78,00% dengan Realisasi = 67,74% dan Target 2022 = 78,00%.

Indikator ini adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2020 tahun pembuatan 2021 memakai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2020 tahun pembuatan 2021, jadi LkjIP yang menjadi Indikator untuk nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit adalah LkjIP tahun 2020 yang telah dievaluasi oleh Inspektorat.

Saat ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 telah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperoleh nilai **67,74%** dengan kategori **BAIK** yaitu pengertiannya adalah Akuntabilitas Kinerja sudah BAIK, memiliki sitem yang dapat dipergunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Uraian hasil evaluasi atas masing – masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja meliputi evaluasi terhadap perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan menunjukkan perolehan nilai 21,87 atau 72,91% dari bobot sebesar 30% yang masuk kategori SANGAT BAIK.

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Target Kinerja sebagian belum relevan dengan kegiatan.
2. Renja Tahunan belum optimal dimanfaatkan dalam penyusunan Anggaran.
3. Rencana aksi belum optimal dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja.

Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran

menunjukkan perolehan nilai 14,69 atau 58,75% dari bobot 25% yang termasuk kategori CUKUP.

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. IKU yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semester) belum optimal.
4. Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi.

C. Pelaporan Kinerja.

Evaluasi atas pelaporan kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan perolehan nilai 10,42 atau 69,46% dari bobot sebesar 15% yang termasuk kategori BAIK.

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi ada yang belum sama pembandingnya sehingga persentase pencapaian tidak sesuai.
2. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan kinerja.

D. Evaluasi Internal.

Evaluasi atas evaluasi internal meliputi evaluasi terhadap Pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan perolehan nilai 6,93 atau 69,33% dari bobot sebesar 10% yang termasuk kategori BAIK.

Hasil evaluasi atas evaluasi internal, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum optimal dilaksanakan dan disampaikan kepada pihak – pihak yang berkementingan.
2. Belum ada pemantauan Rencana aksi sehingga belum bisa memberikan alternatif perbaikan setiap periode dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Evaluasi atas pencapaian sasaran / kinerja organisasi meliputi evaluasi terhadap kinerja yang dilaporkan baik input maupun output menunjukkan perolehan 13,33 atau 66,67% dari bobot sebesar 20% yang termasuk kategori BAIK.

Jawaban Hasil Rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota (APIP) adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja akan diupayakan relevan dengan kegiatan.
2. Renja tahunan akan dioptimalkan dalam penyusunan anggaran.
3. Rencana aksi akan dioptimalkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
4. IKU akan di seleraskan dengan dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.
5. Capaian kinerja mulai dari eselon IV ke atas akan dikaitkan dengan pemberian *reward dan punishment*.
6. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran).
7. Menggunakan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
8. Akan membandingkan target dan realisasi sehingga persentase pencapaian bisa diukur.
9. Menyajikan laporan kinerja dengan efisiensi sumber daya.
10. Informasi dan laporan kinerja akan digunakan dalam perbaikan perencanaan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan.
11. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana aksi.

12. Melaksanakan pemantauan rencana aksi dalam pengendalian kinerja.

Adapun kegiatan tahun 2020 yang mendukung keberhasilan untuk meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Program dan Kegiatan yang Mendukung
Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit
Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Kegiatan : Penyediaan Administrasi Keuangan - Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman - Kegiatan : Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp. 588.000.000,00 Rp. 171.800.000,00 Rp. 17.920.000,00 Rp. 31.500.000,00
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 63.804.000,00
3	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Kegiatan : Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 4.167.000,00
	Jumlah	Rp. 877.191.000,00

2.2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan RSUD dr Achmad Darwis dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 23
Kinerja Keuangan RSUD dr Achmad Darwis tahun 2018 – 2020

	Target tahun 2018	Realisasi tahun 2018	%	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	%	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	%
Pendapatan	22.384.867.000,00	21.851.611.148,00	97,62	23.084.867.000,00	23.423.444.667,33	101,5	21.384.747.000,00	22.311.076.995,00	104,33
Belanja	47.614.652.841,29	44.327.099.132,02	93,09	53.751.072.285,17	50.326.184.280,00	93,63	47.404.809.344,00	42.991.125.104,00	90,69
Belanja tdk Langsung	13.091.012.816,00	12.734.270.624,00	97,27	15.021.736.310,00	14.776.705.860,00	98,37	15.274.485.590,00	14.939.507.047,00	97,81
Belanja Langsung	34.523.640.025,29	31.592.828.508,02	91,51	38.729.335.975,17	35.549.478.420,00	91,79	32.130.323.754,00	28.051.618.057,00	87,31
- Belanja Pegawai	4.036.200.000,00	3.616.849.000,00	89,61	4.563.753.000,00	3.817.351.104,00	83,64	4.708.593.000,00	4.118.128.144,00	87,46
- Belanja Brg & Jasa	22.087.501.936,17	19.965.734.212,00	90,39	21.100.136.732,17	19.570.427.522,00	92,75	20.064.256.255,00	17.417.075.144,00	86,81
- Belanja Modal	8.399.938.089,12	8.010.245.296,02	95,36	13.065.446.243,00	12.161.699.794,00	93,08	7.357.474.499,00	6.516.414.769,00	88,57
Sulplus/ (Defisit)	(25.229.785.841,29)	(22.475.487.984,00)	89,08	(30.666.205.285,17)	(26.902.739.613,33)	87,73	(26.020.062.344,00)	(20.680.048.109,00)	79,48

Sumber : data keuangan RSUD dr Achmad Darwis Tahun 2020

Dari data Tahun 2020 diatas terlihat bahwa RSUD belum bisa membiayai belanja rutinnya karena masih defisit sebesar Rp 20.680.048.109,00 atau 79,48 % dari total belanja yang ada baik belanja tidak langsung, belanja langsung pegawai, barang jasa dan belanja modal.

Diharapkan sekali perhatian Pemda terhadap RSUD dr. Achmad Darwis lebih meningkat karena selain rumah sakit bersifat sosial untuk masyarakat, rumah sakit juga bersifat ekonomis untuk masyarakat menengah keatas dengan pendapatan Rumah Sakit menjadi PAD tertinggi.

Untuk melengkapi standar pelayanan Kelas C yang terakreditasi SNARS, RSUD dr. Achmad Darwis yang harus dipenuhi RSUD adalah sarana dan prasarana.

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 beberapa pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang telah dilakukan, yaitu :

1. Pembangunan gedung IGD PONEK tahun 2012.
2. Pembangunan gedung Perawatan ICU tahun 2014.
3. Pembangunan gedung Rawat Inap Penyakit Dalam tahun 2015.
4. Pembangunan gedung Poli Paru tahun 2015.
5. Pembangunan sarana air bersih tahun 2015.
6. Pembangunan Gedung Poliklinik bertingkat (Tingkat dua kantor) tahun 2016.
7. Pembangunan gedung rawat inap khusus paru tahun 2016.
8. Lanjutan pembangunan gedung perawatan ICU untuk NICU tahun 2016.
9. Drainase rumah sakit tahun 2017 (belum maksimal).
10. Pemagaran rumah sakit tahun 2017 (belum maksimal).
11. Pembangunan gedung Central Sterile Supply Departement (CSSD) tahun 2018.
12. Pembangunan gedung ruang kamar operasi tahun 2018 (belum refresentatif dan memenuhi standar akreditasi RS, karena hanya gedungnya saja peralatan dan asesoris untuk ruangan kamar operasi sebanyak 3 kamar belum terisi, sehingga gedung belum dapat digunakan untuk saat ini).
13. Pembangunan garase ambulance tahun 2018.
14. Pembangunan pembuatan paving block pekarangan rumah sakit tahun 2018 (belum maksimal).

15. Pembangunan rumah cold storage tahun 2018.
16. Pemeliharaan gedung kantor dan rawat inap lainnya setiap tahun anggaran.
17. Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi tahun 2019
18. Pembangunan Gedung Instalasi Laundry tahun 2019
19. Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) tahun 2020

Dalam melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana tidak hanya melengkapi sarana gedung saja, tetapi hal yang sangat penting adalah melengkapi alat kedokteran, alat labor, bahan habis pakai, obat-obatan, mobileur dan lainnya.

Diantara alat kedokteran dan alat kesehatan yang dilengkapi tahun 2014 sampai tahun 2020 adalah

1. Alat bedah Laparaskopi (OK) tahun 2014
2. Alat operasi mata Feco tahun 2014.
3. Alat Radiologi (X-Ray) tahun 2015
4. Mikroskop Mata (Kamar Operasi) tahun 2015
5. Eccokardiografi tahun 2015
6. Treadmill tahun 2015
7. ECG tahun 2015
8. Pasien monitor tahun 2015
9. Centrifuge (Laboratorium) tahun 2015
10. Hematologi (Laboratorium) tahun 2015
11. ECG, syringe pump, Infuse pump, Patient monitor,slip lamp,Endoscopy THT, Antrostomi THT, suction, CPAP, Ventilator bayi, Incubator Bayi,Blod Gas Analyzer pengadaan tahun 2016.
12. Generator Set (Genset, Bangunan Genset dan Panel Listrik) DAK tahun 2017.
13. Bed Head tahun 2017.
14. Meja Operasi tahun 2017.
15. Mesin Anastesi tahun 2017.
16. USG 4 Dimensi untuk Radiologi (Penyakit Dalam) tahun 2017
17. Emergency Trolly tahun 2017.
18. ECG tahun 2017.
19. Stretcher tahun 2017.
20. Oximeter tahun 2017.

21. Patient monitor tahun 2017.
22. Biometri tahun 2017.
23. Meja Pemeriksa tahun 2017.
24. Infant warmer tahun 2017.
25. Autoclave tahun 2017.
26. Kendaraan ambulance transport DAK tahun 2017.
27. Pesawat sinar-x dental panoramic tahun 2018.
28. Steam Autoclave tahun 2018.
29. Automatic processing tahun 2018.
30. Phototerapi tahun 2018.
31. Mesin antrian untuk pasien tahun 2018.
32. Mesin pendingin sampar (cold storage) tahun 2018.
33. Vena Detektor tahun 2018.
34. Suction tahun 2018.
35. Dopler tahun 2018.
36. Resusitasi bayi tahun 2018.
37. Patient monitor tahun 2018.
38. Patient monitor anak tahun 2018.
39. Inkubator transport tahun 2018.
40. Box bayi tahun 2018.
41. Meja mayo tahun 2018.
42. Mesin Anastesi tahun 2019
43. Pendan surgery tahun 2019
44. Pendan anastesi tahun 2019
45. Patient monitor tahun 2019
46. USG 3-4 Dimensi tahun 2019
47. Steam Sterilizer tahun 2019
48. Washer Desinfektan tahun 2019
49. Ultrasonic tahun 2019
50. Emergency Stretcher Tahun 2020
51. Monitor For Laparascopy Tahun 2020
52. Laparascopy Tahun 2020
53. Ventilator Transport Tahun 2020
54. Syringe Pump & Infuse Pump Tahun 2020

Dalam melengkapi sarana, prasarana dan alat kesehatan/kedokteran rumah sakit sesuai dengan kebutuhan rumah sakit klas C dan standar rumah sakit terakreditasi maka di tahun 2021 ini dilakukan Pengadaan Pembangunan dan Peralatan, antara lain :

1. Pembuatan Pagar Rumah Sakit
2. Pengadaan Alat Endoscopy (DAK)
3. Pengadaan Alat CPAP (DAK)
4. Pengadaan Alat Incubator Baby (DAK)
5. Pengadaan Alat Infant Warmer (DAK)
6. USG Portable
7. Pengadaan alat kesehatan/kedokteran lainnya (BLUD).
8. Perbaikan gedung – gedung di rumah sakit (BLUD).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 24

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis Kab. Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rentra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	Permenkes Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan	Terpenuhinya sumber daya rumah sakit	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	87,98%	80,46%	0	66,00%	66,00%	-
2	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.129/Menkes/SK /II/ 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum daerah RSUD dr. Achmad Darwis, Berlaku untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	78,00%	80,00%	82,00%	82,00%	79,57%	81,72%	0	80,00%	80,00%	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sesuai dasar PermenPAN No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.M.PAN/2/2004	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	82,00%	85,00%	85,00%	85,00%	80,08%	80,36%	0	81,00%	81,00%	-
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis oleh Inspektorat/ APIP di tahun N	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	70,00%	75,00%	78,00%	78,00%	63,89%	67,25%	0	64,00%	64,00%	-

Jadi berdasarkan data tabel Tabel 27 (T-C.30) dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Achmad Darwis pada tahun 2020 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Target = 85,00% terealisasi sebesar 80,36% dan Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit dari Target = 75,00% terealisasi sebesar 67,25%, namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Indikator : Persentase Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar dari Target = 70,00% terealisasi sebesar 80,46% dan Indikator : Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target dari Target = 80,00% terealisasi sebesar 81,72%.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Achmad Darwis

Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 secara umum baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik maupun kinerja keuangan, yang sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

a. Faktor Internal

- Jenis dan jumlah SDM masih kurang.
- Tarif pelayanan rumah sakit sudah tidak sesuai tingkat kewajaran.
- Sarana, prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit kelas C sehingga perlu adanya penambahan untuk gedung, kendaraan dan peralatan kesehatan/ kedokteran baik medik dan Non Medik (Permenkes 47 Tahun 2021).
- Pemagaran sekeliling rumah sakit dan pekarangan parkir rumah sakit.
- SIMRS masih belum optimal.
- Keamanan masih perlu ditingkatkan.
- Mutu pelayanan masih perlu ditingkatkan.

- Gedung kamar operasi yang belum bisa digunakan (alat kesehatan/kedokteran dan asesorir untuk 3 ruang/kamar operasi belum terisi sehingga gedung belum bisa dimanfaatkan/digunakan saat ini).
- b. Faktor Eksternal
 - Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota belum memanfaatkan rumah sakit secara maksimal, sebagian masih berobat ke kota.
 - Kurangnya perhatian Pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit, sehingga rumah sakit masih mengandalkan anggaran dari DAK yang memiliki menu serta juklak dan Juknis khusus, padahal kebutuhan rumah sakit tidak tertuang dalam menu DAK tersebut.
 - Lokasi rumah sakit yang jauh dari pusat kota.
 - Transportasi yang kurang lancar.
 - Masih ada masyarakat kurang mampu tidak memiliki jaminan kesehatan.
 - Belum adanya kebijakan yang mengikat agar seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota mau menggunakan akses berobat ke RSUD dr. Achmad Darwis.

Berdasarkan permasalahan diatas jumlah SDM yang kurang merupakan masalah yang cukup mendasar dalam rangka peningkatan mutu layanan di rumah sakit. Menyikapi permasalahan ini kedepan perlu adanya penambahan sumber daya manusia di setiap bidang yang membutuhkan.

Permasalahan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis yaitu masih kurangnya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana di RSUD dr Achmad Darwis saat ini adalah kurang refresentatifnya dan tidak memenuhi standar bangunan yang ada. Rata – rata bangunan yang ada sudah lama dan sudah harus dilakukan perbaikan dan renovasi bahkan dilakukan penambahan gedung baru. Saat ini sudah ada penambahan gedung baru dan perbaikan gedung – gedung yang rusak melalui anggaran APBD, DAK dan BLUD rumah sakit. Kedepan masih banyak yang harus diperbaiki dan pembangunan gedung baru diantaranya gedung Rekam Medis/Medical Record, penambahan ruang rawat inap, serta perbaikan gedung – gedung rumah sakit dikarenakan masih banyaknya gedung-gedung lama sesuai master plan rumah sakit.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis sangat ditunjang oleh ketersediaan peralatan kesehatan/kedokteran, kondisi saat ini peralatan kedokteran yang tersedia belum memadai sehingga pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kebutuhan RSUD dr. Achmad Darwis yaitu peralatan kesehatan yang sangat dibutuhkan di RSUD dr. Achmad Darwis.

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik bidang kesehatan rujukan, beberapa hal yang menjadi peluang sekaligus strategi untuk mengatasi permasalahan atau upaya peningkatan pelayanan adalah :

1. Tersedianya sumber daya yang memadai.
2. Menyusun usulan perubahan tarif melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
3. Tersedianya sarana dan prasarana di RSUD dr. Achmad Darwis
4. Tersedianya anggaran rumah sakit yang memadai.
5. Pembenahan manajemen keuangan RSUD dr. Achmad Darwis.
6. Terlaksananya pelaksanaan Akreditasi rumah sakit versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 untuk tahun 2022 dengan lulus paripurna SNARS.
7. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan RSUD dr. Achmad Darwis oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, DPRD dalam pengembangan rumah sakit sesuai master plan rumah sakit.
9. Adanya dukungan pemerintah Daerah untuk alokasi dana untuk pengadaan alat kesehatan dan asesoris 3 ruangan/kamar operasi agar dapat digunakan gedung kamar operasi yang dibangun tahun 2018 dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
10. Meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
11. Bekerjanya Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dalam RSUD dr. Achmad Darwis.
12. Adanya upaya pemeliharaan keamanan dilingkungan RSUD dr. Achmad Darwis.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari Perangkat Daerah lain di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tidak memuat catatan perubahan untuk BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis

3.1 Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pagu anggaran pada Renja Awal 2021 sebesar Rp. 54.132.722.262,00 dengan 3 program, 6 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan. Dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 terdapat 3 program, 9 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 53.628.046.484,00. Dan adanya pergeseran pertama/ Refocusing Tahun 2021 yaitu adanya penambahan anggaran covid 8 % sehingga anggaran menjadi Rp 66.200.908.30,00, kemudian terjadi Pergeseran Anggaran Ke 2, tapi tidak mengubah jumlah pagu anggaran . Selanjutnya dalam usulan Perubahan Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp. 66.828.775.281,00.

Adapun program dan kegiatan pada Renja Perubahan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2020 tersebut adalah sebagai mana dalam Tabel 2 berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
102010606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah langganan koran/majalah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		100 %	475 eksemplar	475 eksemplar	85 %	100 %	2.850.000	2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	2.850.000	
102010608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah porsi makan dan minum tamu yang disediakan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		100 %	557 porsi	557 porsi	85 %	100 %	5.940.000	5.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	5.940.000	
102010609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah porsi makan dan minum rapat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		100 %	34 oh 884 porsi	31 oh 884 porsi	85 %	100 %	44.502.000	44.432.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	43.480.000	
1020108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											590.035.000	620.035.000			690.063.500		
102010802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		100 %	12 bulan	12 bulan	85 %	100 %	582.750.000	612.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	676.200.000	
102010804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	- Jumlah OH Perjalanan Dinas Dalam Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		100 %	0 - 71 Oh	0 - 71 Oh	85 %	100 %	7.285.000	7.285.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	13.863.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1020202014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit kelas C (Alat Kesehatan/ Kedokteran DAK) Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit kelas C (Alat Kesehatan Penanganan Covid 19)	Persentase sarana, alat kesehatan rumah sakit sesuai standar rumah sakit kelas C dan Bahan Habis Pakai untuk penanganan Covid 19	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		85 % 82 % 75 %	3 Paket	2 Paket 1 Paket	75 %	75 %	6.898.393.711	7.849.648.711	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	85 % 82 % 75 %	7.011.055.500	
1020202017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Jumlah Barang Habis Pakai yang tersedia untuk pelayanan pasien Covid 19	Persentase sarana, alat kesehatan rumah sakit sesuai standar rumah sakit kelas C dan Bahan Habis Pakai untuk penanganan Covid 19	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		85 % 82 % 75 %		2 paket	75 %	75 %	0	945.060.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	85 % 82 % 75 %	0	
102020202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											250.000.000	721.000.000			287.500.000		
102020204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Jumlah Kunjungan Pasien Covid 19 yang dilayani di RS	Persentase Penanganan Covid 19, Vaksinasi Covid 19 dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		85 % 82 % 75 %		360 orang	82 %	85 %	0	168.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	85 % 82 % 75 %	0	
102020207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Jumlah Limbah Infeksius Covid 19 yang diangkut	Persentase Penanganan Covid 19, Vaksinasi Covid 19 dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		85 % 82 % 75 %		2400 kg	82 %	85 %	0	48.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	85 % 82 % 75 %	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
102020206	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	Persentase Penanganan Covid 19, Vaksinasi Covid 19 dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		85 % 82 % 75 %	30 orang	30 orang	82 %	85 %	250.000.000	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	85 % 82 % 75 %	287.500.000	
102020302	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Jumlah Peserta yang di Vaksinasi di Rumah Sakit	Persentase Penanganan Covid 19, Vaksinasi Covid 19 dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		85 % 82 % 75 %		305 orang	82 %	85 %	0	255.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	85 % 82 % 75 %	0	
10203		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										0	3.972.500.000		0			
102032		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										0	3.972.500.000		0			
10203202	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN yang menerima Insentif Penanganan Covid 19	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		75 %		48 orang		75 %	0	3.972.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	75 %	0	
10205		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										974.700.000	774.700.000		1.124.355.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
102051	2.0	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										974.700.000	774.700.000				1.124.355.000	
102051	2.0	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Hibah PMI Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (dokter reveral) Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (Mitra RS) Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (Pendayagunaan Dokter Spesialis/WKDS)	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki		82 %	3 orang 4 dokumen 2 orang	1 lembaga 3 orang 4 dokumen 2 orang	82 %	82 %	974.700.000	774.700.000	Dana Insentif Daerah	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	82 %	1.124.355.000
TOTAL												53.628.046.484	66.828.775.281				125.228.044,856	

Berdasarkan Tabel 25 dapat dijelaskan bahwa anggaran awal RSUD dr. Achmad Darwis adalah Rp. 53.628.046.484 dengan 3 program, 9 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dan pagu perubahan menjadi Rp 66.828.775.281 dengan 4 program, 10 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - ❖ Sub Kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - e. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - f. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
 - ❖ Sub Kegiatan : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2. Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
 - ❖ Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- ❖ Sub Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - ❖ Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai
- b. Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - ❖ Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - ❖ Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - ❖ Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3. Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- ❖ Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
4. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Sub Kegiatan : Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

RSUD dr. Achmad Darwis menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021, sebagai Pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan Tahun 2021. Rencana Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Rencana Kinerja ini adalah sebagai penjabaran dari RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk pelaksanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) dijabarkan dalam APBD setiap tahunnya. Dalam dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

Perencanaan kinerja pembangunan bidang kesehatan yang telah dibentuk ini diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi segala kegiatan yang dilakukan sehingga nantinya diharapkan agenda pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik.

Suliki, 23 September 2021
Direktur
RSUD dr. Achmad Darwis

